

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2017**

RINGKASAN EKSEKUTIF



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dengan tujuan untuk mendokumentasikan Isu Prioritas lingkungan hidup DKI Jakarta dan bagaimana kebijakan telah diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

Untuk mengetahui akar permasalahan yang tersirat dari anjuran-anjuran masyarakat yang terdapat didalam jawaban interview, jawaban-jawaban tersebut kemudian dicari kesamaannya, dikelompokkan dan dikategorisasikan kedalam komponen-komponen dalam metode DPSIR (*Drivers, Pressure, State, Impact, Response*). Dari hasil kategorisasi tersebut, didapatlah gambaran inti permasalahan dalam bentuk kumpulan masalah lingkungan hidup (*states*) dan *pressures* -nya. Untuk menentukan masalah utama, kumpulan masalah tersebut lalu dilakukan penapisan dengan bantuan bagan *holistik*. Dari bagan holistik, terlihat hubungan kausal dan keterkaitan antara beberapa *pressures* dengan *states*, hingga didapatlah tujuh (7) *states* sebagai Masalah Utama.

Untuk menentukan Isu Prioritas, ketujuh masalah utama tersebut lalu dilakukan penapisan dengan cara pembobotan berdasarkan tiga (3) kriteria, yaitu :

1. Dampak masalah utama tersebut terhadap kerusakan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
2. Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya
3. Masalah utama tersebut mendapat perhatian public yang luas dan perlu segera ditangani secara urgent.

Pembobotan dilakukan oleh SKPD-SKPD yang diundang ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan diberikan kuosioner untuk melakukan pembobotan. Dari pembobotan tersebut, didapatlah Isu Prioritas (*states*) DKI Jakarta, yaitu :

1. Banjir
2. Pencemaran
3. Kemacetan
4. Pemukiman Tidak layak Huni.



Adapun dua (2) Masalah Utama yang tidak menjadi Isu Prioritas adalah :

1. Pencemaran minyak musiman tiap tahun di Kepulauan Seribu
2. Pengambilan karang dan pasir di Kepulauan Seribu

Kedua Masalah Utama ini tidak dijadikan Isu Prioritas karena terdapat indikasi tindakan kriminal pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu *response* terhadap kedua masalah ini adalah pengusutan lebih lanjut dengan melibatkan pemerintah pusat.

Keempat Isu Prioritas yang didapat lalu dianalisa dengan cara melihat hubungan kausal antara *pressures* dan *states* untuk menentukan kebijakan (*response*) pemerintah yang telah dan harus diambil dalam menanggapi permasalahan didalam Isu Prioritas.

I. BANJIR.

Isu prioritas DKI Jakarta yang utama adalah banjir. Diprediksi Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050 jika tidak dilakukan mitigasi terhadap banjir. *Pressures* banjir terdiri dari :

1. Penurunan permukaan tanah, yang disebabkan oleh pengambilan air tanah berlebihan,
Kecepatan penurunan tanah Jakarta sebesar 5-18cm/tahun. Permukaan tanah Jakarta hingga saat ini telah turun 4m dan 40% area Jakarta sudah dibawah permukaan laut. Berdasarkan penelitian Dinas Pertambangan DKI Jakarta th 2007, banyaknya gedung di Jakarta memberi kontribusi 80% pada turunnya permukaan tanah Jakarta, sedangkan menurut penelitian Institut Teknologi Bandung th 2015, pengambilan air tanah berlebihan adalah penyebab utama dan memberi kontribusi 47% turunnya permukaan tanah Jakarta.
2. Naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global
Laju kenaikan permukaan air laut di Teluk Jakarta akibat pemanasan global diperkirakan sebesar 0.5cm per tahun.
3. Berkurangnya area resapan air hujan akibat semakin banyaknya gedung dan alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penyimpangan fungsi lahan paling besar terjadi di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kawasan hijau di Jakarta Barat berkurang 34 persen dan di Jakarta Utara berkurang 25 persen. Sementara itu, perubahan fungsi kawasan di Jakarta Pusat lebih banyak terkonsentrasi pada



alih fungsi lahan. Tak kurang dari 60 persen kawasan perumahan di Jakarta Pusat berubah menjadi kawasan niaga dan perkantoran.

4. Buruknya fasilitas drainase Jakarta

Drainase yang buruk menyebabkan tersumbatnya jalan air. DKI Jakarta tidak memiliki sistem drainase yang terintegrasi, bahkan banyak daerah yang tidak memiliki drainase. Hanya 4% warga Jakarta yang memiliki akses ke sistem drainase dan pengolahan air limbah yang baik, sedangkan sisanya 96% warga Jakarta – atau sekitar 9,2 juta orang – membuang air limbahnya ke saluran terbuka, atau membuang tanpa diolah.

5. Sampah di saluran air/drainase/sungai

Sampah yang berada di saluran air akan menyumbat aliran air tersebut dan menyebabkan banjir. Penyebab adanya sampah di saluran air disebabkan perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan drainase/badan air, dan kurangnya infrastruktur persampahan. Dari data tahun 2010-2013, didapat gambaran bahwa sisa produksi sampah/sampah yang tidak terangkut per hari mengalami peningkatan sebesar 5-15% per tahunnya. Sampah yang tidak terangkut tersebut adalah sumber sampah yang akan berakhir di saluran air, sungai, danau/situ, dan akhirnya ke laut mematikan pohon-pohon Mangrove karena sampahnya menutupi akar-akar tunjang Mangrove, dan juga merusak terumbu karang. Sampah di laut juga mematikan biota laut yang memangsa sampah karena mengira bahwa sampah tersebut adalah mangsa alaminya.

6. Pengurangan kapasitas sungai (akibat sedimentasi sungai dan pendudukan bantaran sungai untuk bangunan liar).

Penyimpangan penataan ruang di hulu sungai adalah penyebab utama sedimentasi sungai. Penataan ruang di hulu yang buruk memberikan dampak yang buruk pada ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), antara lain peningkatan lahan kritis, kekeringan, yang kemudian menyebabkan longsor dan erosi. Erosi dan longsor ini yang menyebabkan mengalirnya sedimen dalam jumlah besar ke sungai dan mengakibatkan sedimentasi/pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai ini menyebabkan menurunnya kapasitas sungai karena mengurangi daya tampung sungai. Dari penghitungan debit *discharge* dari periode Januari 1901 hingga Desember



2005 pada *watershed* Ciujung, Cisadane, Ciliwung dan Citarum yang dihitung di hulu dekat Jakarta, sedimen bertambah antara 1x10³ hingga 42x10 ton/tahun dan debit bertambah antara 2,5 – 35 m³/detik/bulan. Penambahan debit ini mencerminkan debit air yang tidak tertampung oleh sungai yang telah berkurang kapasitasnya.

Menyempitnya bantaran sungai sebagai daerah aliran sungai pada saat musim hujan telah mengurangi kapasitas sungai, akibatnya pemukiman di bantaran sungai menjadi langganan banjir ketika debit air meningkat. Tingginya harga tanah DKI Jakarta dan tidak tersedianya perumahan yang terjangkau mendorong warga miskin menduduki bantaran sungai untuk tempat tinggal. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menduduki bantaran kali adalah sebesar 102.395 KK (tahun 2016)

Pressures no. 2, dan 5 erat kaitannya dengan aspek perubahan tata guna lahan, dan *pressure* no. 4 erat kaitannya dengan perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan.

Response (kebijakan) yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi *pressure* no. 1 (turunnya permukaan tanah) terintegrasi dalam Master Plan Proyek Strategis Nasional *National Capital Integrated Coastal Development*, yaitu :

1. Penghentian pengambilan air tanah

Industri yang tetap memerlukan air tanah harus membayar pajak sesuai yang diatur oleh Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no. 86 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah, dan pada tahun 2018 akan dikeluarkan peraturan untuk melarang penggunaan air tanah bagi keperluan domestik

2. Memperluas layanan perpipaan dan penambahan sumber suplai air baku.

Pengelolaan dan distribusi air baku DKI Jakarta berada dibawah konsesi perusahaan swasta Palyja dan Aetra. Palyja mensuplai area DKI Jakarta bagian barat, sedangkan Aetra mensuplai bagian timur. Secara total, suplai air baku eksisting adalah sebesar 18,025 liter/detik, sedangkan jumlah kebutuhan air baku DKI Jakarta adalah 22 liter/detik, yang berarti DKI Jakarta masih defisit suplai air baku sebesar 4 liter/detik. Sejak tahun 2016 hingga Maret 2017 Palyja telah menambah 188 sambungan baru dan Aetra telah menambah



2.750 sambungan baru. DKI juga akan menambah suplai air yang terintegrasi dengan Proyek Strategis Nasional NCICD.

Response (kebijakan) yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi *pressure* no. 2 (naiknya permukaan laut) terintegrasi dalam Master Plan Proyek Strategis Nasional *National Capital Integrated Coastal Development* tahap Emergency 2017-2019, pembangunan tanggul laut. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir yang telah dikerjakan PemProv DKI Jakarta pada tahun 2017 adalah :

1. Pembangunan Tanggul Pantai Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta dengan pemasangan *Spun Pile* sepanjang 154,5 m (2017) dan sepanjang 61,45 m (2016) di Kamal Muara, dari total rencana *trace* sepanjang 740 m, sehingga total yang sudah dipasang tanggul sampai dengan tahun 2017 adalah sepanjang 215,95 m
2. Pembangunan Tanggul Pantai Fase A NCICD Aliran Timur Provinsi DKI Jakarta dengan pemasangan spun pile sepanjang 336,64 m (2017) dan sepanjang 250 m (2016) di Kali Blencong, dari total rencana *trace* sepanjang 2750 m, sehingga total yang sudah dipasang tanggul sampai dengan tahun 2017 sepanjang 586,64 m

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi *pressure* no. 3 (Berkurangnya area resapan air hujan) adalah Pembangunan hutan kota dan memperbesar RTH dengan membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi *pressure* no. 4 (Buruknya drainase Jakarta) adalah dengan menyelesaikan *Jakarta Sewerage System* (JSS) sebagai bagian Proyek Strategis Nasional dalam NCICD. Pembangunan JSS ditunda hingga 2019 . JSS mencakup 15 zona, dengan focus pada zone 1 (bagian pusat dan utara Jakarta) dan Zone 6 (bagian barat Jakarta). Total biaya untuk zone 1 diperkirakan \pm Rp 8 triliun, dan untuk Zone 6 diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi *pressure* no. 5 (Sampah di saluran air/drainase/sungai/situ/waduk/laut) adalah dengan mengadakan program “Satu RW Satu Bank



Sampah”. Untuk program ini tidak ada anggaran dari Pemda karena dikhawatirkan akan bersifat proyek yang jika tidak ada dananya maka akan berhenti

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi pressure no. 6 (Pengurangan kapasitas sungai akibat sedimentasi sungai dan pendudukan bantaran sungai untuk bangunan liar) adalah dengan :

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi pressure no. 5 adalah :

1. Normalisasi Sungai Ciliwung

Normalisasi kali ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal, yaitu 35 – 50 meter, perkuatan tebing, pembangunan tanggul, jalan inspeksi dengan lebar 6 – 8 meter di sepanjang sisi Kali Ciliwung, meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 m³/det menjadi 570 m³/det serta menata kawasan di sekitar Kali Ciliwung.

2. Pengerukan sungai

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Pemerintah Pusat melakukan kerjasama dengan World Bank perihal Program JEDI (Jakarta Emergency Dredging Initiative) atau proyek pengerukan 13 sungai di Jakarta

II. PENCEMARAN

Isu Prioritas yang kedua adalah Pencemaran, yang terbagi atas pencemaran air (sungai, situ, waduk, air tanah dan air laut) dan pencemaran udara.

A. Pencemaran Air

Berdasarkan Status Mutu Sungai tahun 2017, 67% sungai di Jakarta dalam kondisi tercemar berat, 22% tercemar sedang, 11% tercemar ringan dan 0% dalam kondisi baik. Debit air sungai terbesar yang mengalir ke Jakarta adalah dari berasal WBC/Ciliwung, lalu dari Cengkareng Drain. Beban BOD terbesar adalah sumbangan dari Pompa Pluit dan Grogol, sebagai salah satu



daerah terpadat di Jakarta. Sumbangan Total Nitrogen terbesar adalah dari Cengkareng Drain diikuti oleh WBC/Ciliwung dan sumbangan Total Phosphorous terbesar ke Jakarta adalah WBC Ciliwung diikuti oleh Cengkareng Drain

Berdasarkan status mutu situ, pada tahun 2017 terdapat 43% situ tercemar berat, 33% cemar sedang, 20% cemar ringan dan dalam kondisi baik hanya 5%. Pada tahun 2017, jumlah situ yang tercemar berat meningkat dari 25% menjadi 43%.

Berdasarkan status Mutu Air Tanah, 7% air tanah Jakarta dalam kondisi tercemar berat, 19% tercemar sedang, 34% tercemar ringan dan 40% masih dalam kondisi baik. Trend status mutu air tanah yang buru menurun di tahun 2014-2016, tapi kemudian meningkat lagi di tahun 2017.

Response dari status mutu air yang buruk ini adalah pembangunan IPAL dan JSS yang terintegrasi dalam proyek NCICD, dan juga menggiatkan masyarakat dalam program Sanimas.

B. Pencemaran Udara

Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (pneumonia, TBC dan tersangka TBC BTA+) adalah tiga dari sepuluh penyakit yang paling banyak diderita di Jakarta selama tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara DKI Jakarta tidak cukup sehat. Kondisi udara di Jakarta ditentukan dengan mengacu kepada pengukuran Indeks Status Pencemar Udara (ISPU) didalam Keputusan Kepala Bapedal No. 107 Tahun 1997 Tentang Perhitungan Dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara. Berdasarkan ISPU. Dari data ISPU, secara keseluruhan dalam setahun di 2017, kualitas udara di Jakarta adalah selama 212 hari per tahun dalam keadaan sedang, dan 110 hari dalam keadaan tidak sehat, atau sepertiga tahun dalam kondisi tidak sehat.

Response PemProv DKI Jakarta dari kondisi ini adalah :

1. Memperbaiki transportasi umum sehingga diharapkan pengendara kendaraan pribadi tertarik untuk mempergunakan transportasi umum



2. Mengadakan Car Free Day di jalan utama Sudirman Thamrin untuk mengembalikan kondisi udara perkotaan

III. Kemacetan

Kemacetan lalu lintas di Jakarta dari tahun ke tahun terus meningkat. Menurut data Bappenas, tahun 2017, kerugian untuk Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 67,5 triliun, sementara wilayah Bodetabek mencapai Rp 100 triliun/tahun. Jalanan di Jabodetabek didominasi oleh sepeda motor. Sepeda motor yakni sebesar 75%, kendaraan pribadi sebesar 23% dan 2% oleh kendaraan.

Kebijakan yang diambil dalam menanggulangi kemacetan :

1. Penambahan panjang jalan dan peningkatan kualitas dan kuantitas kendaraan umum diharapkan dapat mengurangi kemacetan Jakarta
2. BPTJ meniyasati kemacetan lalu lintas dengan evaluasi dan melakukan Analisa Dampak Lingkungan (Andalalin) khususnya kemacetan yang disebabkan proyek-proyek Pemerintah seperti MRT dan LRi T.
3. PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) bekerjasama dengan Koperasi Wahana Kalpika (KWK) mewujudkan angkutan lingkungan sebagai pengumpan ke sistem BRT dalam rangka mengintegrasikan layanan angkutan lingkungan yang tersedia saat ini dengan layanan Transjakarta.

IV. PEMUKIMAN KUMUH

Data dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta, ada dua kota administratif DKI Jakarta, tercatat Jakarta Utara dan Jakarta Barat memiliki jumlah RW kumuh terbanyak. Sementara itu, jumlah RW kumuh paling sedikit berada di Kepulauan Seribu. Dari 264 RW kumuh yang diteliti tahun 2013, hanya 41 RW di Jakarta yang tergolong tidak kumuh.



Komposisi jumlah RW kumuh tersebut adalah lima di Kepulauan Seribu, 32 di Jakarta Timur, 34 di Jakarta Selatan, 42 di Jakarta Pusat, 55 di Jakarta Barat, dan 55 di Jakarta Utara.

Response yang diambil oleh PemProv DKI Jakarta dalam menanggulangi hal ini adalah membangun rusunami dan relokasi penduduk yang menghuni bantaran sungai ke rusunami tersebut.

Selain response yang disebutkan diatas, inovasi-inovasi kebijakan yang diambil PemProv DKI dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah :

1. Penjemputan e-waste (limbah elektronik)

Saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mengatur pembuangan limbah elektronik. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berinisiatif mengurangi permasalahan limbah elektronik dengan mengadakan program penjemputan limbah elektronik (e-waste) ke lokasi warga yang ingin membuang e-waste seberat minimal 5kg. Kegiatan penjemputan limbah e-waste ini tidak dipungut biaya. Selain penjemputan langsung, warga pun bisa mengantarkan sampah elektroniknya ke kelurahan dan kecamatannya dan meletakkannya di *drop box* yang tersedia. Limbah elektronik yang terkumpul di kelurahan dan kecamatan tersebut kemudian akan dijemput oleh Dinas Lingkungan Hidup provinsi DKI Jakarta.

Untuk program penjemputan e-waste ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan dua perusahaan jasa pelayanan pengolahan limbah industri kategori bahan beracun berbahaya (B3) yang telah memenuhi standar peraturan, yaitu PT Prasardha Pamunah Limbah Industri (PT. PPLI) dan PT. Mukhti Mandiri. Tugas pengolahan limbah elektronik dibagi menjadi dua, yaitu limbah elektronik seperti telepon genggam diolah oleh PT PPLI dan limbah logam lainnya diolah oleh PT Mukhti Mandiri